



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2021 - 2022**

SENIN, 1 NOVEMBER 2021

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,*

Yang Kami hormati:

- Para Wakil Ketua DPR;**
- Para Anggota DPR;**
- Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

Selamat datang kembali kepada seluruh Anggota yang telah menjalani masa reses dan siap melaksanakan tugas konstitusional melalui sidang rapat di gedung DPR RI.

Masa Persidangan II ini merupakan masa sidang yang singkat, namun demikian DPR RI memiliki sejumlah agenda strategis untuk diselesaikan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, termasuk pelaksanaan diplomasi parlemen.

DPR RI memberikan apresiasi atas keberhasilan tim bulu tangkis putra Indonesia pada Piala Thomas 2020 yang digelar pada tahun ini, hal ini menjadi momentum untuk mengembalikan kejayaan bulutangkis Indonesia.

DPR RI juga mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Provinsi Papua yang telah sukses

menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua; DPR RI juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada kontingen Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil menjadi Juara Umum dalam PON XX.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pelaksanaan fungsi legislasi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ini, melanjutkan penyelesaian prolegnas prioritas tahun 2021. Sejumlah RUU sedang dalam pembahasan pada pembicaraan Tingkat I. Selain itu terdapat juga peraturan pelaksanaan Undang Undang yang membutuhkan pembahasan bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

Penyelesaian pembahasan RUU prioritas prolegnas 2021, agar dapat menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan Pemerintah, karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur rakyat dalam menilai kinerja program legislasi nasional.

Sebuah RUU merupakan upaya dalam pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk

dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pembentukan Undang-Undang melalui pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah agar dapat mengupayakan norma hukum yang selaras dengan Pancasila dan amanat UUD NRI 1945.

Kebutuhan hukum atas sebuah Undang-Undang sangat ditentukan oleh tuntutan perkembangan jaman serta dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. DPR RI dan Pemerintah dituntut agar dapat membuat norma hukum di dalam Undang-Undang yang dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, melindungi seluruh rakyat, memenuhi rasa keadilan, menjamin ketertiban dan kepastian hukum, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan perkembangan dalam menyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, maka dalam menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 agar dilakukan secara cermat serta memiliki dasar pertimbangan dan tingkat kebutuhan hukum yang tinggi,

serta mempertimbangkan mekanisme pembahasan dalam situasi Pandemi Covid-19.

Pembahasan pada saat situasi Pandemi ini menjadi tantangan besar bagi DPR RI bersama Pemerintah. Dalam menjalankan fungsi legislasi untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, DPR RI tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk membahas RUU secara transparan, terbuka terhadap masukan publik, menyerap aspirasi masyarakat, serta dilaksanakan dengan memenuhi tata kelola pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, sesuai siklus dan mekanisme APBN, pembahasan dan penetapan Rancangan Undang Undang APBN Tahun 2022 menjadi Undang Undang APBN Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan, serta Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN yang berisikan rincian program, kegiatan, keluaran (*output*), serta rincian jenis belanja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

(KPJM). Rincian APBN tersebut dapat menjadi landasan dalam melakukan fungsi pengawasan DPR RI di bidang anggaran, yaitu apakah program, kegiatan, dan belanja negara telah dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana yang telah disepakati antara DPR RI dan Pemerintah, kebijakan fiskal pada tahun 2022 mendatang akan dijalankan secara antisipatif dan responsif dengan tetap fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan sosial yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah diharapkan untuk terus mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan Covid-19 serta langkah-langkah pemulihan ekonomi dan sosial, agar kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

DPR RI melalui komisi-komisi terkait akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN Tahun 2022 agar berjalan dengan baik dan mendorong

Pemerintah untuk melakukan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan yang disertai dengan reformasi APBN yang efektif.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan, pada Masa Persidangan ke II ini akan diarahkan pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Fungsi pengawasan DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan dan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat.

Berbagai permasalahan yang saat ini menjadi perhatian luas dari rakyat antara lain:

- Kasus pinjaman online ilegal;
- Rencana kenaikan Upah Minimum 2022;
- Penanganan Pandemi Covid-19, yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, danantisipasi ketidakpastian Covid-19;
- Kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali;
- Antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrim;
- Kesiapan Pemerintah menghadapi lonjakan Covid-19 menjelang akhir tahun 2021;
- Rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia.

DPR RI selalu dituntut rakyat untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat. DPR RI dengan kewenangan yang dimilikinya, akan secara efektif mendorong Pemerintah semakin baik kinerjanya dalam menangani pelayanan dan urusan rakyat. Sehingga rakyat selalu merasakan

kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam menjaga komitmen untuk tetap menjalankan peran diplomasi parlemen, pada masa Sidang ini DPR RI akan menugaskan delegasi untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti beberapa pertemuan kerja sama antarparlemen. Delegasi DPR RI, baik secara luring maupun daring, antara lain direncanakan akan menghadiri sidang:

1. *The 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26)* di Glasgow pada 7 November,
2. *The 143rd Assembly of the IPU* di Madrid, Spanyol pada 26-30 November, dan
3. *The 29th Annual Meeting of the APPF* di Seoul, Korea Selatan pada bulan Desember.

Melalui aktivitas diplomasi parlemen tersebut, DPR RI dapat bertukar pandangan dengan berbagai pemangku kepentingan demi penguatan peran diplomasi DPR RI,

delegasi juga akan terus aktif melaksanakan kegiatan BKSAP Day dan menghadiri berbagai webinar.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berangsur menurun dan diharapkan Indonesia dapat segera mengalami pemulihan ekonomi dan sosial. Melalui kewenangan yang dimilikinya, DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai upaya dan kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi, untuk dapat memperkuat upaya penanganan Pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial; sehingga rakyat kembali dapat hidup dengan sejahtera, maju dan tentram.

Akhirnya, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, saya atas nama Pimpinan DPR mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan II DPR RI, Tahun Sidang 2021-2022, akan dimulai sejak hari ini, Senin 1 November 2021 sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini, dan kepada yang terhormat seluruh Anggota DPR RI, kami

menyampaikan “**selamat menjalankan tugas konstitusi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.**”

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

MERDEKA!!!

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Om shanti shanti om.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

DR (HC) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN

Pembahasan RUU pada Pembicaraan Tingkat I, antara lain:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.